

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Shalhhakka Dimar Farrakhy, Sofia Prima Dewi

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: shlhkkfrkh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, belanja pegawai, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder dari pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur selama periode lima tahun, yaitu 2019 hingga 2023. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, yang melibatkan 39 pemerintah daerah. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak Eviews 12 SV Lite dengan metode regresi data panel untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan, dana perimbangan dan belanja pegawai tidak berpengaruh negatif, sementara belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar model ini dapat menjelaskan variasi dalam kemandirian keuangan daerah, sementara hasil uji t menunjukkan signifikansi masing-masing variabel dalam mempengaruhi kemandirian keuangan. Uji F mengonfirmasi bahwa model yang digunakan memiliki kesesuaian yang baik. Temuan ini menyarankan bahwa meskipun PAD dan dana perimbangan penting, belanja modal memegang peranan yang lebih signifikan dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Implikasi dari penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi pemerintah daerah, pembuat kebijakan, dan manajer keuangan dalam meningkatkan efisiensi belanja modal untuk memperkuat kemandirian keuangan. Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur keuangan publik, khususnya terkait dengan pengembangan dan otonomi keuangan daerah di Indonesia.

Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai, Belanja Modal

Abstract

This study aims to examine the impact of local revenue (PAD), balancing funds, employee expenditures, and capital expenditures on regional financial independence. The research uses secondary data from regional governments in East Java Province, covering a five-year period from 2019 to 2023. A non-probability sampling method with purposive sampling technique was applied, and the data was collected from 39 local governments. The analysis was conducted using the Eviews 12 SV Lite software, applying panel data regression to identify the relationships between variables. The results indicate that local revenue (PAD) does not have a positive effect on financial independence, while balancing funds and employee expenditures do not show a negative impact. However, capital expenditures have a positive influence on regional financial independence. The model's R^2 value indicates the explanatory power of the model, while the t-test results reveal the significance of each variable in influencing financial independence. The F-test confirms the overall model's goodness of fit. These findings suggest that while local revenue and balancing funds are crucial, capital expenditures play a more significant role in improving regional financial autonomy. The study has practical implications for regional governments, policymakers, and financial managers, indicating that enhancing capital expenditure efficiency is key to strengthening financial independence. This research contributes to the literature on public finance, especially in the context of regional development and financial autonomy in Indonesia.

Keywords: Regional Fiscal Independence, Local Own-Source Revenue, Revenue Sharing Funds, Employee Expenditure, Capital Expenditure

*Correspondence Author: Shalhhakka Dimar Farrakhy
Email: shlhkkfrkh@gmail.com



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik yang dipimpin oleh seorang Presiden. Dengan bentuk kesatuannya tersebut, Indonesia terbagi atas daerah-daerah yang terdiri atas daerah provinsi yang terbagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota (Ramdhani et al., 2025). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dasar hukum tertinggi mengamanatkan bahwa setiap daerah tersebut memiliki pemerintah daerah yang bertugas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya masing-masing sesuai dengan otonominya (Meinarsari & Nursadi, 2022; Arpat & Azis, 2022). Namun, dalam pelaksanaan otonomi tersebut, pemerintah daerah harus dapat menjalin sinergi dengan pemerintah pusat sehingga dapat mencapai tujuan bernegara (Nandi, 2024; Magister Ilmu Hukum, 2025). Sinergi ini menjadi penting agar kebijakan nasional dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal tanpa mengorbankan kesatuan negara (Risdiarto, 2017).

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pengurusan pemerintahan ke dalam tiga jenis, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum (UU No. 23/2014; Bihuku, 2018). Pemerintah daerah berhak menjalankan kekuasaannya pada urusan pemerintahan konkuren (Zaki, Widodo, & Al Ridwan, 2023). Salah satu bentuknya adalah pengelolaan fiskal daerah (Fauzi & Purnamawati, 2023). Pengelolaan fiskal di daerah tersebut diratifikasi dalam suatu instrumen yang disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Setianda, Suwarno, & Abdillah, 2024). Dalam praktiknya, kemampuan fiskal daerah dan efisiensi dalam pengelolaan APBD menjadi indikator penting dalam mewujudkan kemandirian daerah (Mahpudin & Lestari, 2021).

Struktur APBD yang kuat berdampak pada kekuatan pemerintah daerah untuk dapat menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya (Kurniawan, 2018). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 27 ayat (1) menerangkan bahwa struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sedangkan belanja daerah dapat diklasifikasikan menjadi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan transfer. Salah satu parameter dalam penilaian kekuatan struktur APBD adalah kapasitasnya.

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu dari 38 daerah otonom tingkat satu yang berlokasi di ujung timur Pulau Jawa. Sebagai provinsi yang menempati peringkat pertama provinsi terluas di Pulau Jawa dengan luas 47.803,49 km² (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021), pada tahun 2024, provinsi ini merupakan salah satu provinsi dengan kapasitas APBD terbesar ketiga di Indonesia (Idris, 2024). Hal itu menunjukkan bahwa pendapatan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu pendapatan tertinggi di Indonesia. Kekuatan struktur APBD ini dapat berdampak pada kemandirian keuangan daerah. Pemerintah daerah yang mandiri ditunjukkan dengan kemampuannya memaksimalkan PAD menjadi sumber pendapatan utama untuk membiayai belanjanya sehingga pemerintah daerah tersebut tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya (Malau dan Parapat, 2020). Selain itu, dengan pendapatan yang lebih besar, suatu daerah dapat memiliki ruang fiskal yang lebih lebar untuk mengalokasikan belanjanya. Terlebih lagi, dengan PAD yang besar, daerah cenderung dapat lebih mandiri secara finansial dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam belanjanya tanpa harus mempertimbangkan biaya kemudian atas pendapatan yang diperoleh dari pihak ketiga (Putri, Siboro, Safitri, dan Aulia, 2024).

Malau dan Parapat (2020) menekankan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber daya daerah tersebut. Maksimalisasi dan optimalisasi tersebut bertujuan untuk dapat mengurangi atau bahkan tidak bergantung pada pihak eksternal daerah, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Definisi tersebut sejalan dengan definisi yang

dikemukakan oleh Arpani dan Halmawati (2020). Maksimalisasi dan optimalisasi penggalan potensi sumber daya daerah tersebut tercermin dalam pendapatan asli daerah.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh PAD, dana perimbangan, belanja pegawai, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Malau dan Parapat (2020). Hasil penelitian Malau dan Parapat (2020) adalah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel, yaitu dana perimbangan dari artikel jurnal karya Arpani dan Halmawati (2020). Hasil penelitian tersebut menunjukkan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Perbedaan lainnya dengan penelitian terdahulu adalah penambahan variabel keempat dari artikel jurnal karya Fitriyani dan Suwarno (2021), yaitu belanja pegawai. Hasil penelitian tersebut menunjukkan belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dari latar belakang permasalahan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk memperoleh bukti empiris apakah pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Untuk memperoleh bukti empiris apakah dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Untuk memperoleh bukti empiris apakah belanja pegawai memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Untuk memperoleh bukti empiris apakah belanja modal memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Manfaat penelitian ini diharapkan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ekonomi publik, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah, serta dapat dijadikan sebagai dasar referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi empiris yang dapat membantu pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya daerahnya melalui pembentukan kebijakan fiskal daerah yang efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses penyusunan beberapa langkah logis dengan cara ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan tertentu (Syahrizal dan Jailani, 2023). Menurut Creswell dan Creswell (2023), desain penelitian merupakan proses perencanaan yang didasari aktivitas, waktu, dan pertanyaan penelitian sebagai petunjuk untuk memilih kerangka kerja dan informasi yang menjelaskan hubungan antara variabel. Desain penelitian yang dirancang dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan dan menentukan penyebab di balik gejala tertentu (Abdullah, 2015 dalam Maharani, Puspitasari, dan Yantiana, 2024).

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel fiskal daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Indonesia. Variabel yang diuji dalam penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja pegawai, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Fokus utama penelitian ini adalah mengukur dan menganalisis bagaimana kontribusi masing-masing komponen keuangan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, maupun belanja rutin, memengaruhi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena pendekatan ini memungkinkan untuk melakukan pengukuran yang objektif dan sistematis atas hubungan antar variabel menggunakan data numerik, serta memungkinkan pengujian hipotesis secara statistik.

Penelitian ini bersifat kausal-komparatif, yakni bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Dalam konteks ini, Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, belanja pegawai, dan belanja modal merupakan variabel independen yang

diduga memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kemandirian keuangan daerah. Keempat hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang untuk menguji arah dan kekuatan pengaruh masing-masing variabel terhadap kemandirian fiskal daerah. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya bertujuan deskriptif, tetapi juga inferensial, karena mencoba menarik kesimpulan umum dari data empiris untuk populasi yang lebih luas.

Objek penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia dengan pertimbangan bahwa tingkat kabupaten/kota merupakan satuan pemerintahan yang paling operasional dalam mengelola keuangan daerah dan menjalankan fungsi pelayanan publik dan provinsi yang bertindak meregulasi dan mengatur pengelolaan daerah otonomi dengan cakupan yang lebih luas. Pemilihan objek ini juga mempertimbangkan ketersediaan data keuangan daerah yang lengkap dan terpublikasi secara berkala melalui Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Periode observasi yang digunakan adalah selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023 untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan tren yang konsisten atas hubungan antar variabel yang diteliti.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber resmi, baik dari institusi maupun pribadi (Sanusi, 2011 dalam Alvini et al., 2018). Data PAD, dana perimbangan, belanja pegawai, belanja modal, total belanja daerah, serta total pendapatan daerah diperoleh dari laporan realisasi APBD masing-masing daerah yang dapat diakses melalui situs masing-masing pemerintah daerah atau melalui Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD yang diterbitkan oleh BPK RI. Sementara itu, data mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah dihitung berdasarkan rasio kemandirian keuangan, yakni perbandingan antara PAD terhadap total pendapatan daerah. Data dikumpulkan dan diolah dalam bentuk panel (data time series dan cross section) untuk memungkinkan analisis dinamis antar waktu dan antar wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis Data

Penelitian ini memiliki uji analisis data yang terdiri dari uji statistik deskriptif, uji analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi berganda (Adjusted R-squared), uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t).

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data dari masing-masing variabel penelitian, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), Rasio Pendapatan Asli Daerah (RPAD), Rasio Dana Perimbangan (RDP), Rasio Belanja Pegawai (RBP), dan Rasio Belanja Modal (RBM). Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai nilai rata-rata (mean), nilai maksimum dan minimum, dan simpangan baku (standard deviation). Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
RKKD	195	0,000402	0,999994	0,518787	0,348154
RPAD	195	0,074029	0,666253	0,202233	0,113555
RDP	195	0,228328	0,750258	0,599863	0,092623
RBP	195	0,033951	0,508657	0,361428	0,061646
RBM	195	0,057105	0,335919	0,146259	0,052176

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data dalam penelitian ini. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 195 data observasi. Kolom nilai maximum menunjukkan hasil pengamatan tertinggi, sedangkan nilai minimum mencerminkan hasil pengamatan terendah dari data yang diolah. Nilai standar deviasi digunakan untuk menggambarkan simpangan baku dari rata-rata, sementara nilai mean mencerminkan rata-rata dari keseluruhan data yang dianalisis. Dari hasil tersebut, uraian masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

- a. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD): Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa RKKD memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,518787 dengan standar deviasi sebesar 0,348154. Nilai ini menunjukkan RKKD secara keseluruhan pada 39 pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur. Nilai standar deviasi menunjukkan bahwa variasi RKKD antar pemerintah daerah relatif kecil dan data cenderung tersebar di sekitar nilai rata-rata. RKKD dengan nilai terkecil (minimum) sebesar 0,000402 terjadi di Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2021, sedangkan nilai terbesar (maksimum) sebesar 0,999994 terjadi di Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2021.
- b. Rasio Pendapatan Asli Daerah (RPAD): Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa RPAD memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,202233 dengan standar deviasi sebesar 0,113555. Nilai ini menunjukkan RPAD secara keseluruhan pada 39 pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur. Nilai standar deviasi menunjukkan bahwa variasi RPAD antar pemerintah daerah cukup kecil dan data cenderung tersebar di sekitar nilai rata-rata. RPAD dengan nilai terkecil (minimum) sebesar 0,074029 terjadi di Pemerintah Kabupaten Sampang pada tahun 2021, sedangkan nilai terbesar (maksimum) sebesar 0,666253 terjadi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022.
- c. Rasio Dana Perimbangan (RDP): Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa RDP memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,599863 dengan standar deviasi sebesar 0,092623. Nilai ini menunjukkan RDP secara keseluruhan pada 39 pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur. Nilai standar deviasi menunjukkan bahwa variasi RDP antar pemerintah daerah kecil jika dibanding dengan nilai rata-rata. RDP dengan nilai terkecil (minimum) sebesar 0,228328 terjadi di Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2019, sedangkan nilai terbesar (maksimum) sebesar 0,750258 terjadi di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022.
- d. Rasio Belanja Pegawai (RBP): Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa RBP memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,361428 dengan standar deviasi sebesar 0,061646. Nilai ini menunjukkan RBP secara keseluruhan pada 39 pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur. Nilai standar deviasi menunjukkan bahwa variasi RBP antar pemerintah daerah kecil jika dibanding dengan nilai rata-rata. RBP dengan nilai terkecil (minimum) sebesar 0,033951 terjadi di Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023, sedangkan nilai terbesar (maksimum) sebesar 0,508657 terjadi di Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2020.
- e. Rasio Belanja Modal (RBM): Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa RBP memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,146259 dengan standar deviasi sebesar 0,052176. Nilai ini menunjukkan RBP secara keseluruhan pada 39 pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur. Nilai standar deviasi menunjukkan bahwa variasi RBP antar pemerintah daerah kecil jika dibanding dengan nilai rata-rata. RBP dengan nilai terkecil (minimum) sebesar 0,057105 terjadi di Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2020, sedangkan nilai terbesar (maksimum) sebesar 0,335919 terjadi di Pemerintah Kabupaten Tuban pada tahun 2023.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Tujuan dilakukannya analisis regresi linear berganda

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, belanja pegawai, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada seluruh pemerintah daerah yang terdiri atas pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di provinsi Jawa Timur periode tahun 2019 s.d. 2023. Hasil analisis regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.030135	0.885750	-0.034021	0.9729
RPAD	0.252489	1.115507	0.226344	0.8212
RDP	0.194435	1.050929	0.185013	0.8535
RBP	0.551548	0.621022	0.888129	0.3759
RBM	1.243551	0.598810	2.076705	0.0395

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda di atas, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = -0,030135 + 0,252489 \text{ RPAD} + 0,194435 \text{ RDP} + 0,551548 \text{ RBP} + 1,243551 \text{ RBM} + \varepsilon$$

Persamaan regresi linear berganda di atas menunjukkan arah dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien regresi dari variabel independen yang menunjukkan tanda positif berarti terdapat pengaruh searah terhadap variabel dependen, sedangkan koefisien regresi dari variabel independen yang menunjukkan tanda negatif berarti terdapat pengaruh yang berlawanan arah terhadap variabel dependen.

Konstanta sebesar -0,030135 berarti nilai kemandirian keuangan daerah berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah akan bernilai sebesar -0,030135 jika variabel independen bernilai 0. Koefisien regresi PAD bernilai positif sebesar 0,252489 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam PAD menyebabkan kemandirian keuangan daerah meningkat sebesar 0,252489 satuan dengan anggapan bahwa variabel lainnya konstan. Koefisien regresi dana perimbangan bernilai positif sebesar 0,194435 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam dana perimbangan menyebabkan kemandirian keuangan daerah meningkat sebesar 0,194435 satuan dengan anggapan bahwa variabel lainnya konstan. Koefisien regresi belanja pegawai bernilai positif sebesar 0,551548 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam belanja pegawai menyebabkan kemandirian keuangan daerah meningkat sebesar 0,551548 satuan dengan anggapan bahwa variabel lainnya konstan. Koefisien regresi belanja modal bernilai positif sebesar 1,243551 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam belanja modal menyebabkan kemandirian keuangan daerah meningkat sebesar 1,243551 satuan dengan anggapan bahwa variabel lainnya konstan.

Uji Koefisien Determinasi Berganda (Adjusted R-Squared)

Uji koefisien determinasi berganda (Adjusted R-Squared) digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi variasi variabel dependen, yaitu kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yang digunakan dalam model yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja pegawai, dan belanja modal.

Nilai Adjusted R-Squared berkisar antara 0 hingga 1. Semakin nilai Adjusted R-Squared mendekati angka 1, maka semakin besar kemampuan model regresi menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, nilai Adjusted R-Squared yang kecil menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi dari variabel dependen, dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Statistik	Nilai
<i>R-squared</i>	0,502451
<i>Adjusted R-squared</i>	0,364971

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan output regresi dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), diperoleh nilai R-squared sebesar 0,502451. Ini berarti bahwa keempat variabel independen dalam model, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja pegawai, dan belanja modal secara simultan mampu menjelaskan sekitar 50,25% variasi yang terjadi dalam variabel dependen, yaitu kemandirian keuangan daerah. Adapun sisanya sebesar 49,75% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini, seperti potensi ekonomi lokal, efisiensi pengelolaan keuangan, serta kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang tidak dimasukkan dalam model.

Sementara itu, nilai Adjusted R-squared sebesar 0,364971 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan sampel yang digunakan, kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen mengalami penyesuaian turun menjadi sekitar 36,50%. Adjusted R-squared ini memberikan gambaran yang lebih konservatif dan realistis dibandingkan R-squared murni terutama dalam konteks model dengan beberapa variabel independen.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen (pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja pegawai, dan belanja modal) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kemandirian keuangan daerah. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut.

- H₀ (hipotesis nol): tidak terdapat pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- H_a (hipotesis alternatif): terdapat pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji F

Keterangan	Nilai	Keterangan	Nilai
R-squared	0,502451	Mean dependent var	0,518787
Adjusted R-squared	0,364971	S.D. dependent var	0,348154
S.E. of regression	0,277439	Akaike info criterion	0,465476
Sum squared resid	11,69981	Schwarz criterion	1,187214
Log likelihood	-2,383909	Hannan-Quinn criter	0,757699
F-statistic	3,654711	Durbin-Watson stat	2,253217
Prob(F-statistic)	0,000000		

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil regresi Fixed Effect Model (FEM), diperoleh nilai F-statistic sebesar 3,654711 dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000000. Nilai probabilitas ini jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi yang umum digunakan ($\alpha = 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima, yaitu terdapat pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Artinya, secara simultan keempat variabel independen tersebut, yakni pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja pegawai, dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model ini keseluruhan variabel bebas yang digunakan memiliki kontribusi penting dalam menjelaskan variabilitas dari kemandirian keuangan daerah.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam uji t adalah sebagai berikut:

- a. H0: Variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.
- b. H1: Variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika nilai $|t\text{-statistic}| > t\text{-tabel} (1,653)$ dan $\text{probability} < 0,05$ maka H_a diterima. Artinya, variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil uji t menggunakan Aplikasi Eviews12 SV Lite disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.030135	0.885750	-0.034021	0.9729
RPAD	0.252489	1.115507	0.226344	0.8212
RDP	0.194435	1.050929	0.185013	0.8535
RBP	0.551548	0.621022	0.888129	0.3759
RBM	1.243551	0.598810	2.076705	0.0395

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari hasil uji t pada tabel di atas, dapat dijelaskan tentang pengaruh masing masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t-statistic sebesar 0,226344, dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,8212. Nilai ini jauh lebih kecil dari t-tabel dan lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel RPAD tidak berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.
- b. Dana perimbangan memiliki nilai t-statistic sebesar 0,185013, dengan p-value 0,8535, juga lebih kecil dari t-tabel dan lebih besar dari 0,05. Maka, variabel RDP tidak berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.
- c. Belanja pegawai memiliki nilai t-statistic sebesar 0,888129 dan p-value sebesar 0,3759. Nilai ini pun berada di bawah t-tabel dan lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.
- d. Belanja modal memiliki nilai t-statistic sebesar 2,076705 yang lebih besar dari t-tabel (1,653) dan p-value sebesar 0,0395 yang lebih kecil dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dengan demikian, dari keempat variabel yang diuji, hanya belanja modal yang terbukti berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja pegawai tidak menunjukkan pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja modal daerah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Penelitian ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur dalam menggali dan mengelola PAD belum mampu mendorong tingkat kemandirian fiskal daerah secara optimal. Meskipun secara normatif PAD dianggap sebagai indikator utama kemandirian daerah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pendapatan asli yang diperoleh masih tergolong rendah dan belum cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri tanpa bergantung pada dana transfer pusat. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan basis pajak dan retribusi daerah, rendahnya kinerja BUMD sebagai penyumbang PAD, serta lemahnya inovasi pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal.

Selain itu, tingginya beban belanja rutin seperti belanja pegawai juga dapat menyerap sebagian besar PAD, sehingga menyulitkan alokasi anggaran untuk belanja yang lebih produktif.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusmila (2023) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah yang ditandai dengan pemberian kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota, masih cenderung diarahkan pada pembiayaan belanja rutin dan operasional, bukan pada peningkatan belanja modal. Kondisi ini berkontribusi pada belum tercapainya kemandirian keuangan daerah secara optimal. Salah satu penyebab tidak signifikannya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal dan secara tidak langsung terhadap kemandirian fiskal adalah karena adanya permasalahan agency antara pihak eksekutif dan legislatif di tingkat daerah. Dalam konteks ini, usulan anggaran belanja dari pemerintah daerah harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif, yang seringkali menyebabkan kebijakan penganggaran tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan strategis pembangunan daerah.

Dalam perspektif teori signalling, PAD seharusnya menjadi sinyal atas kapasitas fiskal suatu daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri. Semakin tinggi PAD, semakin kuat sinyal yang dikirimkan kepada pemerintah pusat dan stakeholder lainnya seperti organisasi dan masyarakat bahwa daerah tersebut mampu mengelola potensi ekonominya. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah yang mengindikasikan bahwa sinyal fiskal dari PAD belum cukup kuat atau kredibel untuk meyakinkan stakeholder akan kemampuan otonomi fiskal daerah.

Salah satu penjelasannya adalah bahwa struktur PAD masih didominasi oleh jenis penerimaan yang tidak stabil dan kurang responsif terhadap pertumbuhan ekonomi. Safitri dan Sriningsih (2025) menyatakan bahwa mayoritas pajak daerah sebagai salah satu komponen PAD bersifat inelastis terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), artinya penerimaan PAD tidak meningkat proporsional meskipun ekonomi daerah tumbuh. Hal tersebut menyebabkan struktur PAD secara keseluruhan belum mencerminkan potensi fiskal yang substansial dan kredibel. Akibatnya, sinyal yang dikirimkan tidak mampu mengubah persepsi pemerintah pusat maupun pihak lain terhadap tingkat kemandirian daerah. Dengan kata lain, meskipun PAD meningkat, sinyal tersebut belum cukup kuat untuk menggambarkan keberlanjutan fiskal, sebagaimana ditekankan dalam teori signaling bahwa efektivitas sinyal sangat bergantung pada kualitas, konsistensi, dan persepsi atas kredibilitasnya.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil ini menegaskan bahwa besarnya dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur tidak serta-merta meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat ternyata tidak mendorong daerah untuk menjadi lebih mandiri secara fiskal. Sebaliknya, tingginya alokasi dana perimbangan justru berisiko menciptakan ketergantungan fiskal jangka panjang dan melemahkan insentif bagi daerah untuk menggali potensi pendapatan asli secara maksimal. Kondisi ini dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah daerah cenderung bersikap pasif terhadap upaya peningkatan PAD karena merasa "nyaman" dengan dana transfer pusat. Padahal, esensi dari otonomi fiskal adalah mendorong kemandirian. Selain itu, pengelolaan dana perimbangan yang belum optimal, baik dari sisi perencanaan maupun implementasi, juga turut memengaruhi efektivitas penggunaannya terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Nurharjanti (2021) yang menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia dalam periode 2017 s.d. 2019. Hal itu bisa jadi disebabkan karena penggunaan yang tidak tepat guna, terjadi inefektivitas, dan penggunaannya

pada pengeluaran yang bersifat konsumtif serta spekulatif. Aspek-aspek tersebut menyebabkan menurunnya produktivitas dalam optimalisasi perolehan PAD.

Zahidah dan Dientri (2023) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa dana perimbangan tidak memberikan pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah sebagaimana tercermin dalam studi pada Kabupaten Lamongan selama periode 2012 s.d. 2019. Meskipun jumlah dana transfer dari pusat tergolong besar, kontribusinya terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah tetap rendah. Selama rentang waktu tersebut, proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah menunjukkan angka yang dominan, yang berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lamongan masih memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini menjadi indikator bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berjalan efektif dalam mendorong otonomi keuangan daerah.

Dalam perspektif teori signalling, besarnya dana perimbangan yang diterima daerah semestinya menjadi sinyal dari pemerintah pusat bahwa daerah tersebut masih membutuhkan dukungan fiskal untuk menyelenggarakan layanan publik secara memadai. Namun, ketika pemerintah daerah terlalu bergantung pada dana perimbangan, sinyal yang terbentuk justru menunjukkan rendahnya kapasitas fiskal dan ketergantungan tinggi terhadap pusat. Hasil penelitian ini yang menemukan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah mendukung dapat berpotensi menimbulkan pandangan bahwa alih-alih memperkuat kapasitas fiskal, transfer pusat malah berpotensi menciptakan moral hazard, di mana pemerintah daerah menjadi pasif dalam menggali sumber pendapatan sendiri. Namun, temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan dana perimbangan tidak selalu mencerminkan ketergantungan fiskal, dan tidak pula secara otomatis melemahkan sinyal kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri. Artinya, dalam konteks ini, pemerintah daerah tetap mampu mengirimkan sinyal kemandirian fiskal meskipun menerima alokasi dana perimbangan dari pusat.

Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pegawai tidak berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi anggaran untuk belanja pegawai di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tidak berkorelasi secara langsung dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah. Hal ini dapat dijelaskan oleh karakteristik belanja pegawai yang bersifat rutin dan konsumtif, serta lebih diarahkan untuk pembiayaan operasional birokrasi dibandingkan peningkatan kapasitas fiskal daerah secara langsung. Belanja pegawai yang tinggi umumnya menyerap porsi besar dari APBD, tetapi tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Akibatnya, meskipun belanja pegawai tetap penting untuk menjaga keberlangsungan fungsi pemerintahan, pengaruhnya terhadap kemandirian keuangan menjadi terbatas, apalagi jika tidak diimbangi dengan efisiensi dan produktivitas birokrasi.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Defitri (2020) dan Fitriyani dan Suwarno (2021) yang menyatakan bahwa belanja pegawai tidak berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja pegawai sejatinya adalah kontradiksi dari belanja pembangunan melalui belanja modal. Belanja pegawai pada dasarnya merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada aparatur pemerintahan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Selain itu, belanja ini juga berfungsi sebagai insentif untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi belanja pegawai, maka tingkat kemandirian fiskal daerah justru cenderung menurun. Salah satu asumsi yang mendasari hal ini adalah bahwa peningkatan belanja pegawai akan memperbesar porsi anggaran untuk operasional dan pemeliharaan, yang pada satu sisi dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik, namun di sisi lain dapat membebani struktur keuangan daerah.

Dalam kerangka teori signalling, struktur pengeluaran daerah, termasuk belanja pegawai, dapat menjadi sinyal penting mengenai prioritas dan efisiensi pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah. Secara umum, tingginya belanja pegawai sering diasosiasikan dengan beban fiskal yang mengurangi ruang fiskal untuk pengeluaran produktif, sehingga dapat mengirimkan sinyal negatif terkait rendahnya kemandirian fiskal. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan belanja pegawai tidak serta-merta dipersepsikan sebagai beban fiskal yang melemahkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya secara mandiri.

Lebih lanjut, temuan ini memperlihatkan bahwa stakeholder, termasuk pemerintah pusat dan publik, mungkin menilai efektivitas belanja pegawai bukan hanya dari besarnya, tetapi dari sejauh mana belanja tersebut mampu mendukung kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Dengan demikian, belanja pegawai yang terkendali dan diarahkan untuk mendukung fungsi strategis pemerintahan tidak mengirimkan sinyal negatif terhadap kapasitas fiskal daerah. Kondisi tidak berpengaruhnya belanja pegawai terhadap kemandirian keuangan daerah dapat dimaknai sebagai bentuk netralitas sinyal fiskal yang berarti stakeholder tidak menganggap belanja pegawai sebagai indikator utama kemandirian selama belanja tersebut tidak menimbulkan ketidakseimbangan anggaran atau mengganggu belanja produktif lainnya.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa pengalokasian belanja daerah pada sektor-sektor produktif, khususnya pembangunan aset tetap, seperti infrastruktur, fasilitas umum, dan sarana pelayanan publik, mampu mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah. Belanja modal tidak hanya memberi dampak langsung terhadap penyediaan layanan, tetapi juga menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam konteks kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur, hasil ini menjadi indikasi bahwa daerah-daerah yang mampu memprioritaskan belanja modal dalam struktur APBD cenderung memiliki kemampuan fiskal yang lebih mandiri, karena investasi publik yang dilakukan memberi efek jangka panjang bagi peningkatan kapasitas fiskal dan kinerja pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh Sulistyawati et al. (2024) yang menjelaskan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Semakin besar belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maka semakin tinggi juga kemandirian keuangan daerah yang dicapai daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah diketahui dipengaruhi secara positif oleh belanja modal, karena alokasi anggaran pada sektor produktif diyakini mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Dalam perspektif teori signalling, belanja modal mencerminkan upaya strategis pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur dan aset jangka panjang yang mendukung produktivitas ekonomi lokal. Ketika belanja modal meningkat secara terencana dan tepat sasaran, hal tersebut mengirimkan sinyal positif kepada pemerintah pusat dan stakeholder lainnya bahwa daerah memiliki komitmen untuk memperkuat kapasitas fiskalnya secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah memperkuat pandangan tersebut bahwa investasi pemerintah daerah pada sektor produktif dapat meningkatkan penerimaan asli daerah di masa mendatang dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

Lebih lanjut, sinyal dari belanja modal yang efektif juga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder, termasuk investor, terhadap kredibilitas tata kelola fiskal pemerintah daerah. Dalam konteks ini, belanja modal tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga simbol dari kemampuan daerah dalam mengelola anggaran untuk mencapai kemandirian yang sesungguhnya. Oleh

karena itu, hubungan positif antara belanja modal dan kemandirian keuangan daerah memperlihatkan bahwa sinyal investasi publik yang produktif diterima sebagai indikator kesiapan fiskal jangka panjang sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengarahkan pengelolaan keuangannya ke arah yang progresif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja pegawai, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur periode tahun 2019 s.d. 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola PAD belum cukup untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi dan PAD belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat keuangan daerah secara mandiri. Dana perimbangan tidak berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini mencerminkan bahwa besarnya dana perimbangan yang diterima tidak otomatis meningkatkan kemandirian keuangan. Bahkan, berisiko menciptakan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Belanja pegawai tidak berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Besarnya alokasi untuk belanja pegawai yang bersifat rutin tidak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kemandirian keuangan karena cenderung tidak produktif dan lebih menekankan pada pembiayaan operasional daripada penguatan kapasitas fiskal. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pengalokasian anggaran untuk belanja modal terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Investasi dalam infrastruktur dan aset tetap mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arpani, W. N., & Halmawati. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373–2390.
- Arpat, M., & Azis, A. R. (2022). Otonomi daerah di Indonesia: Implementasi, tantangan, dan prospek di masa depan. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.55974>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2021). *Luas wilayah menurut kabupaten/kota (km²), 2016–2020*. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODEjMg==/luaswilayah-menurutkabupaten-kota.html>
- Bihuku, S. (2018). Urusan pemerintahan konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*, 6(1), 38–45.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(2), 107–119.
- Fauzi, E. A., & Purnamawati, N. (2023). Analisis desentralisasi fiskal pada postur APBD Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10(1), 565–571. <https://doi.org/10.37304/wacana.v10i1.9614>
- Fitriyani, E. N. I., & Suwarno, A. E. (2021). Pengaruh PAD, DAU, belanja modal, belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 61–69.
- Idris, M. (2024, September 12). 5 daerah dengan APBD terbesar di Indonesia, Jakarta peringkat pertama. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2024/09/12/104203426/5-daerah-dengan-apbd-terbesar-di-indonesia-jakarta-peringkat-pertama>
- Kusmila, Z. (2023). Pengaruh PAD dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci tahun 2014–2020. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 9226–9234.

- Kurniawan, R. (2018). Mekanisme Pengawasan Dprd terhadap Penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(1), 55–72.
- Magister Ilmu Hukum, D. H., Mulyadi, D., & Mulyana, A. (2025). Implementasi otonomi daerah terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora*, 4(1), 476–488. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i1.2372>
- Mahpudin, & Lestari, F. M. (2021). Analisis kinerja dan kemampuan keuangan daerah: Kasus APBD Kabupaten Lebak tahun anggaran 2018–2020. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Maharani, B., Puspitasari, A., & Yantiana, N. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Berajah Journal*, 4(4), 863–872.
- Meinarsari, A. A., & Nursadi, H. (2022). Arah baru hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah: Sentralisasi atau desentralisasi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i8.9120>
- Nandi, N. (2024). Sinergi kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif. *Case Law: Journal of Law*, 5(2). <https://doi.org/10.25157/caselaw.v5i2.3881>
- Putri, A. A., Siboro, S. F., Safitri, E., & Aulia, N. (2024). Pendapatan asli daerah (PAD) dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Jombang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 64–74.
- Ramdhani, F. A., Triyani, D., Oktafiana, H., & Nananda, I. F. (2025). Dinamika hukum pemerintahan daerah di Indonesia: Tantangan dalam implementasi otonomi dan desentralisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 24455–24459. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.30605>
- Risdiarto, D. (2017). Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 177–193.
- Safitri, R. A., & Sriningsih, S. (2025). Analisis overlay dan elastisitas potensi pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur tahun 2020–2022. *ECo-Buss: Economics and Business*, 7(3).
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Prosiding BIEMA: Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 51–64.
- Setianda, R. A., Suwarno, T. E., & Abdillah, M. R. (2024). Menata APBD, membangun daerah: Menuju kemandirian fiskal melalui efisiensi anggaran serta investasi infrastruktur pada Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*. <https://doi.org/10.47709/jap.v5i1.6215>
- Sulistiyawati, A. I., Illyasa, N., Santoso, A., Nugroho, A. H. D., & Gusmao, C. (2024). Kajian empiris faktor-faktor penentu kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Akutansi dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 23–35.
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23.
- Zahidah, I., & Dientri, A. M. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Manajemen dan Akuntansi*, 14(1), 1–18.
- Zaki, M. L., Widodo, L., & Al Ridwan, F. (2023). Dinamika urusan pemerintahan konkuren pada pemerintahan daerah. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1749>

